

**ANALISIS KINERJA APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI TINJAU PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**(Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)*

*Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)*

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)*

*Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**FIQI AMALIYAH**

**NIM. 19.5.12.0173**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS DATAKORAMA PALU**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, April 2023  
Penyusun.

**FIQI AMALIYAH**  
**NIM :19.5.12.0173**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)**” oleh Mahasiswa atas nama Fiqi Amaliyah NIM : 19.5.12.0173 Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing – masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, April 2023 M  
Ramadhan 1444 H

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

**Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I**  
**NIP. 196707101999032005**

**Abdul Jalil, S.E., M.M**  
**NIP. 198711102019031006**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga serta sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umatnya.

Tiada ucapan yang patut dan pantas diucapkan atas terselesainya skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)”, kecuali ucapan syukur kepada Allah SWT, Karena Dialah sumber kenikmatan dan sumber kebahagiaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang setulus-tulisnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayah kami Kasibut (ALM) yang telah membekali akan pentingnya pendidikan dan ibunda tercinta Hj.Netty Ariani yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, menafkahi , memberi motivasi serta dukungan dan perhatiannya kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan

tinggi. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya, Aamiin.

2. Prof. Dr. H.Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, beserta segenap unsure pimpinan UIN Datokarama Palu, Dr. H. Abidin, M.ag selaku wakil Rektor 1 dalam Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Dr. H. Kamaruddin, M.ag selaku wakil Rektor 2 di Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, dan Dr. Idhan S.Ag., M.Pd selaku wakil Rektor 3 dalam Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama beserta jajarannya, yang telah mendorong dan member kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Akademik Dan Kelembagaan, Dr. Sapruddinn, M.H.I. Selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Dan Kerjasama, Dr. Malkan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan.
4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Dan Noval, M.M Selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah dan Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Dosen Pembimbing I, Dan Abdul Jalil, M.M Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan ikhlas memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu dan sesuai harapan.

6. Seluruh Staf Akademik Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Kepala Perpustakaan Rifai, S.E., M.M beserta seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan, pengarahan dengan baik selama penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi hingga menjadi karya tulis ilmiah.
8. Kepada Informan Seluruh Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Rogo yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi.
9. Kepada Tanteku Mariani Endang yang telah membantu dan memberikan doa dan dukungan selama perjalanan penulis. Kepada Kakaku Asfiani, Asdin, imro'atus sholihah, Moh. Yatim Al-Qosimi dan windi angriani yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Sahabat-sahabat terbaik penulis Rini Safitri, Nafilatun Najah, Nur Afika dan Sitti Masyitah yang telah menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan semua tugas-tugas selama ini serta senantiasa memberikan doa, motivasi, bantuan, dan segala bentuk kebaikan serta dukungan selama perjalanan pendidikan penulis, dan segala bentuk keceriaan, canda tawa susah maupun senang yang telah dilalui bersama tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.

11. Kepada Teman-teman seperjuangan di kelas Ekonomi Syariah 5 Angkatan 2019 UIN Datokarama Palu, Teman-teman KKP, Moh Rizky fikran dan fauzan yang telah memberikan dukungan dan membantu selama belajar di kelas Ekonomi Syariah. Terkhusus Kepada Rifaldi yang telah banyak memberikan masukan, Nasehat, motivasi serta senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu ekonomi syariah dimasa mendatang.

Palu, April 2023  
Ramadhan 1444 H

Penulis

**FIQI AMALIYAH**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Garis-Garis Besar Isi.....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Analisis Kinerja.....	14
C. Pengertian Aparatur Desa.....	18
D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	20
E. Kinerja Aparat Desa dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam.....	23
F. Ekonomi Islam.....	25
G. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Data dan Sumber Data.....	31
D. Sumber Data Sekunder.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	34



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	36
B. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di Desa Rogo.....	45
C. Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Rogo .....	49
D. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo .....	60

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	: Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa rogo .....	37
Tabel 4.2	: Pembangunan Desa Rogo.....	38
Tebel 4.3	: Jumlah Penduduk Desa Rogo .....	40
Tabel 4.4	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rogo .....	40
Tabel 4.5	: Lembaga Pendidikan Formal Desa Rogo .....	41
Tabel 4.6	: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rogo .....	42
Tabel 4.7	: Kepemilikan Ternak masyarakat Desa Rogo .....	43
Tabel 4.8	: Sarana Dan Prasarana Desa Rogo.....	43
Tabel 4.9	:Perencanaan Pembangunan Desa Rogo.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 2 : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Fiqi Amaliyah**  
**NIM : 19.5.12.0173**  
**Judul Skripsi : Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi).**

---

---

Judul skripsi Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana bentuk kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa rogo, 2. Bagaimana bentuk kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa rogo perspektif Ekonomi Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur desa rogo dalam pengelolaan ADD perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur Desa Rogo dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup rendah dari segi kualitas pelayanan dan produktivitas. karena jarang hadir dikantor desa, jika dipresentasikan mungkin tidak sesuai harapan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian faktor Responsivitas, cukup baik karena aparatur desa mendengarkan aspirasi masyarakat dan tanggungjawab cukup baik karena aparatur desa sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan serta akuntabilitas yaitu terbuka dan transparansi. Dalam hal ini kinerja aparatur Desa Rogo Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam karena aparatur Desa rogo lebih mengutamakan maslahat dari pada mudharat.

Implikasi penelitian ini diharapkan masyarakat Desa rogo bisa mengetahui sejauh mana tingkat aparatur Desa Rogo dalam mengelolah alokasi dana Desa. Sehingga masyarakat dapat memahami pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan benar. Maka dari itu diharapkan kepada aparatur Desa bisa lebih baik dalam hal pengelolaan alokasi dana Desa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk dapat mencapai amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah yang tangguh. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.<sup>1</sup>

Sistem pemerintah yang ada dan berlaku pada saat ini yaitu, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantuh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan

---

<sup>1</sup>Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,” *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192.[jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>2</sup>

Pengelolaan Alokasi Dana Desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini masing banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini di sebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenan dengan desa.<sup>3</sup>

Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana desa menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang

---

<sup>2</sup>Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, *Pembangunan Pendesaan dalam Rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press,2010),28.

<sup>3</sup> Moch, solekhan, *Penyelenggaraan pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam membangun mekanisme Akuntabilitas*, ( Malang: Setara Press,2012,80)

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>4</sup>

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan dana desa yang besarnya sekitar satu milyar rupiah bagi 74.958 desa di seluruh Indonesia untuk membangun desa. Keberadaan dana desa ini dapat diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan desanya seraya merubah cara pandang selama ini bahwa cara pandang selama ini bahwa pembangunan hanya berlangsung diperkotaan. Awal juli 2015 dana desa akhirnya mulai turun walau sempat muncul kekhawatiran akan terhambatnya pencairan dana desa terkait adanya tarik-menarik kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDDT). Juga akan adanya kekhawatiran dana desa akan disalahgunakan dan banyaknya kepala desa yang terseret masalah hukum. Pada awal diluncurkannya dana desa, rata-rata desa mendapatkan dana sebesar Rp. 283,77 juta. Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD), YAITU 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap desa di Indonesia setidaknya menerima dana sebesar Rp750 juta yang meliputi Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari tahun ke tahun, dana desa tersebut meningkat hingga tahun 2017, diketahui total anggaran yang digelontarkan pemerintah untuk dana desa mencapai Rp127,74 triliun bagi desa di seluruh Indonesia yang menerima bantuan. Dengan rincian per tahun, yaitu Rp 20,766 triliun (tahun 2015), Rp 46,982 triliun (2016), dan sebesar Rp60 triliun (2017)

---

<sup>4</sup>Dicky Dimas adi pamungkas,yusuf Hubungan peran pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD didesa klodran colomadu karanganyar, *jurnal global citizen* ,2 Nomor 2. Desember (2016) 46.

dengan rata-rata desa mendapatkan uang Rp800 juta hingga Rp1 milyar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.<sup>5</sup>

Sumber Daya Manusia adalah Perencanaan dan pengembangan personel untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Proses peningkatan bakat untuk mencapai tujuan bersama disebut pengembangan bakat. Program pelatihan dan pendidikan karyawan dapat meningkatkan keterampilan para talent perusahaan. Karyawan dengan pekerjaan yang tidak memadai dilatih. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan.<sup>6</sup>

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Selama ini banyak instansi pemerintah yang belum mempunyai karyawan dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan rendahnya produktivitas karyawan dan sulitnya mengukur kinerja karyawan di lingkup instansi pemerintahan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja dan pada tingkat organisasi. Keberhasilan manajemen dalam suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut, artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Heru Cahyono et al, *Pengelolaan dana desa studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerinta desa*, LIPI Press, anggota Ikapi gedung PDDI Lipi, Jakarta , 2020.

<sup>6</sup> Putri kurnia sari, Ainun ni'mah, Khalis fadlulah hana, Analisis sikronisasi budaya kerja sumber daya manusia pada bank syariah Indonesia setelah merger, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam- JIEBI*, V(4), No.1 (2022) 32.

<sup>7</sup>Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep teori dan isu (Yogyakarta:Gava media,2004) 27.



Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang di emban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang di harapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka. Konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.<sup>8</sup>

Di kecamatan Dolo Selatan terdiri dari 12 Desa yaitu salah satunya Desa Rogo, yang memiliki jumlah penduduk 1782 Jiwa terdiri dari laki-laki 890 jiwa dan perempuan 892 jiwa dengan jumlah 552 KK. Di Desa Rogo terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I memiliki jumlah 197 jiwa serta 68 KK, Dusun II memiliki jumlah 360 jiwa serta 116 KK, Dusun III memiliki jumlah 664 jiwa serta 201 KK dan Dusun IV memiliki jumlah 561 jiwa serta 167 KK. RT 1 67 KK dan RT 2 100 KK. Di kecamatan Dolo Selatan ini mengalokasikan Dana kesetiap Desanya pada Tahun 2019 berkisar antara Rp.1.140.625.800.00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) pertahun sudah termasuk anggaran aparatur Desa. Anggaran Dana Desa tiap tahunnya akan bertambah jumlahnya atau bisa juga berkurang jumlahnya tergantung dari sistem perkembangan Desa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,'' *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192.[Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

<sup>9</sup> Ika Verawati (Kaur Umum) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 januari 2023

Jika dilihat dari infrastruktur Desa di Desa Rogo sesuai dengan kebutuhan Desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa di peruntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan jadi tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Rogo cukup baik, pemerintah Desa sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Desa sehingga Desa Rogo ini cukup berkembang dan bisa setara dengan desa lain. Akan tetapi, yang menjadi sisih permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana Desa sehingga timbul kecurigaan tentang penyelewangan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Pelayanan yaitu Ibu Ayu Novilaksmi, mengatakan bahwa selama Bapak Fuad Hudin menjabat sebagai kepala Desa ada beberapa infrastruktur yang telah di bangun seperti drenase, Rabat betton, dan Bedah rumah sebanyak 10 rumah.<sup>10</sup>

Maka dari itu ketika melihat dari Desa lain yang di buat spanduk atau baliho besar untuk bukti bahwa pengalokasian Dana Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada, Namun di Desa Rogo saya tidak melihat dibuatkan spanduk seperti yang ada di Desa lain. Hal tersebut yang membuat banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya terkait pengalokasian dana Desa. Salah satu alasan harus adanya keterbukaan karena agar memudahkan masyarakat untuk melihat serta mengetahuinya sehingga tidak akan muncul kecurigaan tentang penyelewengan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Keuangan yaitu Bapak Ramansyah, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDES di tempatkan dikantor Desa atau di tempat umum. Namun di Desa Rogo kadang menginformasikan kadang tidak sempat di pasang namun beberapa tahun ini belum ada di buat spanduk.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu novilaksmi (Kaur Pelayanan) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 januari 2023

<sup>11</sup> Ramansyah (Kaur Keuangan) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 I januari 2023

Ada sebagian Masyarakat masih sering mengeluhkan para Aparatur Desa yang seringkali tidak ditemui saat jam kerja sehingga jika ada keperluan harus menunggu.

Menurut uraian dari kaur keuangan yaitu Bapak Ramansya jika dipresentasikan menurut saya kinerja aparatur Desa sekitar 50 persen mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena jika ditingkatkan kesejahteraan Aparatur Desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan tugas. Namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi sudah berkeluarga karena harus memenuhi kebutuhan kalau hanya mengharapkan insentif dari dana Desa ini diterima setiap 3 bulan sekali maka itulah yang menyebabkan terkadang Aparatur Desa jarang hadir dikantor Desa karena harus mencari kerja sampingan makanya jika dilihat dari luar kurang efektif.

Tugas Aparatur Desa Rogo Kecamatan Dolo selatan Kabupaten Sigi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tugas yang sangat berat. Suksesnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bergantung pada kinerja aparatur Desa yang terampil dan bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikan. Maka dari itu sumber daya manusia menjadi faktor paling penting untuk mengukur serta meningkatkan kualitas kinerja suatu instansi. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “ Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perspektif ekonomi islam (Studi Di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi)”.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana bentuk kinerja Aparatur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo ?
2. Bagaimana bentuk kinerja Aparatur Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo perspektif ekonomi islam.

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk kinerja aparatur desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo.

- b. Untuk mengetahui bentuk kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo perspektif ekonomi islam.

## **2. Manfaat Penelitian**

### *a. Manfaat teoritis*

- 1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu Ekonomi Islam khususnya
- 2) Dapat menjadi referensi untuk memperkuat teori mengenai Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi di desa rogo kec. Dolo selatan kab. Sigi ).
- 3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

### *b. Manfaat Praktis*

Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengetahuan masyarakat mengenai Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi di desa rogo kec. Dolo selatan kab. Sigi ).

## ***D. Penegasan Istilah***

Untuk mempermudah penulis dalam mengetahui makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini yang merupakan batasan yang sederhana dan merupakan istilah yang penting dalam skripsi ini, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut.

### **1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,” *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192. [Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

## 2. Kinerja

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang di emban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.<sup>13</sup>

## 3. Aparatur Desa

Aparatur desa menurut Dharma Setyawan Salam dalam buku yang berjudul *Managemen Pemerintah Indonesia* menjelaskan bahwa “ Aparatur desa adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Aparatur desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yaitu kepada desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yaitu Kepala desa beserta jajarannya yang ada di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.<sup>14</sup>

## 4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi, Dana Alokasi Khusus (DAK).<sup>15</sup>

## 5. Perspektif ekonomi islam

Perspektif ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha tangan manusia dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan dan

---

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup>Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, “ Analisis efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kab. Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 2*, No.3, (2017).

<sup>15</sup> Dianti lalira dkk, “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan dikecamatan gemeh kabupaten kepulauan talaud”, *jurnal berkala ilmiah efisien*, 18,no 04, (2017) 64.

aturan yang di pakai agar tidak melenceng dari ajaran agama islam. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah usaha tangan manusia yang di landaskna pada Al-Quran dan Hadits.<sup>16</sup>

### ***E. Garis-garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal/skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi proposal/skripsi ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang di ungkapkan dalam materi pembahasan antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tujuan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah Hasil penelitian, membahas mengenai gambaran umum kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dengan membahas rumusan-rumusan masalah bagaimana bentuk kinerja aparatur Desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa ADD di Desa Rogo dan bagaimana bentuk kinerja aparatur Desa dalam pengelolaan alokasi dana Desa (ADD) perspektif Ekonomi Islam di Desa rogo.

---

<sup>16</sup>Sumar in, *Ekonomi Islam: sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif islam*, (Ed. I; Cet; Yogyakarta: Graha ilmu, 2013),3.

Bab V kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab penutup dari isi skripsi ini. Beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta saran yang merupakan input dari penulis yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana Desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian akan di cantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Arianto dengan judul “ Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kinerja aparatur desa dalam pengolaan dana desa sangat efektif, hal tersebut dibuktikan dengan presentase jawaban responden yang tergolong sangat efektif, dilihat dari nilai rekapitulasi tanggapan responden didapat nilai total 334 yang berada pada interval 315-375 yang merupakan kategori sangat efektif.<sup>1</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh serlia R Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparasi.<sup>2</sup>
3. Penelitian ini yang dilakukan oleh reski wahdani dengan judul “ analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa”. Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indicator produktivitas terlihat bahwa produktivitasnya cukup baik. Oleh karena itu, kinerja

---

<sup>1</sup>I Arianto, Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca, Skripsi Universitas sintuvu maroso, (2018)

<sup>2</sup>Serlia R Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan”, *jurnal ekomen*, vol 20, N. 2, (2020)



aparatur desa masih harus melakukan perbaikan demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa tersebut.<sup>3</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Hatimah dengan judul “Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala)”. Dalam penelitian ini kinerja perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa watatu kecamatan dolo seltan kabupaten donggala yang dilakukan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah desa watatu sangat memuaskan. Hal ini karena adanya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta di dukung pula oleh laporan penyelenggara pemerintah desa (LPPD).<sup>4</sup>
5. Penelitian ini dilakukan oleh Sumiati dengan judul “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Dalam penelitian ini penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang di lakukan atas alokasi dana Desa oleh pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang di lakukan oleh pemerintah Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor sumber daya manusia yang tidak memadai.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Reski wahdani, Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa, Skripsi Universitas muhammadiyah Makassar, (2021).

<sup>4</sup> Husnul Hatimah, Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala), Alumni Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Skripsi 2020, Dipublikasikan.

<sup>5</sup> Sumiati Jurnal Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Universitas Tadulako, 2020.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
I Arianto	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa Taunca	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti - Rumusan Masalah beda
Serlia R Lamandasa	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan.	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti - Rumusan Masalah beda
Reski wahdani	Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti -Rumusan Masalah beda
Husnul Hatimah	Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala).	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti - Rumusan Masalah beda
Sumiati	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti -Rumusan Masalah beda

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Analisis**

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.<sup>6</sup>

### **2. Pengertian Kinerja**

Menurut Moeherton kata kinerja berasal dari *taka-taka* job performance dan di sebut juga *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah di capai oleh seseorang karyawan.<sup>7</sup> Sedangkan kinerja menurut Kasmir yaitu hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan satu periode tertentu.<sup>8</sup>

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi di hubungkan dengan visi yang di emban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dan apa

---

<sup>6</sup> (Azwar 2019) Yuni Septian, edo arribé, risnal diansyah , Analisis kualitas layanan system informasi akademik universitas abdurrahman terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sequal, *Jurnal teknologi dan open source*, vol. 3 No.1, (2022) : 131-143

<sup>7</sup>Moeherton, pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),69.

<sup>8</sup>Kasmir, *pengantar manajemen keuangan*, (Ed 2; Cet.1 jakarta: kencana prenada Media Group, 2016), 182.

yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang di harapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka. Konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.<sup>9</sup>

### **3. Analisis Kinerja**

Hakikat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencakup: kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan.<sup>10</sup>

Namun, menurut Agus Dwiyanto mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

#### *a. Produktivitas*

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

---

<sup>9</sup> Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,” *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192.[Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

<sup>10</sup> Veithzal rivai, *managemen sumber daya manusia* untuk perusahaan, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2011)50.

*b. Kualitas Layanan Isu:*

mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

*c. Responsivitas*

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

*d. Responsibilitas*

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

*e. Akuntabilitas*

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau

kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Fandy Tjiptono dimensi kualitas pelayanan terdiri dari yaitu sebagai berikut :

*a. Keandalan (Reliability)*

Dimensi keandalan yaitu kemampuan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

*b. Daya tanggap (Responsiviness)*

Dimensi daya tanggap kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Suatu kebijaksanaan untuk memberikan peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemampuan ini yang ditujukan melalui hubungan, komunikasi, memahami, dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya dilayani dengan baik.

*c. Bukti Fisik (Tangible)*

Dimensi bukti fisik berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman dan sarana dan prasarana lainnya. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Misalnya: bank memiliki gedung bagus, peralatan komputer yang canggih, seragam karyawan atau karyawan yang menarik. Konsep Islam

---

<sup>11</sup>ibid

mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Islam tidak mengakui dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia atau pekerja agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan melupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Sebagian kecil dari Al-Qur'an dan Hadist yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama.<sup>12</sup>

### ***C. Pengertian Aparatur Desa***

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain aparatur Desa dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

---

<sup>12</sup> Ermawati, Riza putrid utami, Irham pakkawaru, Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada nasi kuning puput di kayumalue, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam-JIEBI*, V 2, No.1 (2022)

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 1 angka 4 UU No 6 Tahun 2014 menjawab yang dimaksudkan unsur lain, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Karena



itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya. Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utama pemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat .<sup>13</sup>

#### ***D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa***

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>14</sup>

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan

---

<sup>13</sup>Rendra Risto wuri, Markus kaunang, Novie Revlie Pioh, Kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan public,

<sup>14</sup> Dicky Dimas adi pamungkas,yusuf, Hubungan peran pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD didesa klodran colomadu karanganyar, *jurnal global citizen* ,2 Nomor 2. Desember (2016) 46.

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).<sup>15</sup>

Adapun Dasar Hukum Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik 6 Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Pengelolaan ADD meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Serlia Raflesia Lamandasa<sup>1</sup> , Seprianus Ntada<sup>2</sup> Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, *Jurnal Eksklusif*, 1, No 1, (2017).

<sup>16</sup> ibd

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam pasal 19 terdapat tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa sebagai daerah otonomi, desa memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota,

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2007) 25.

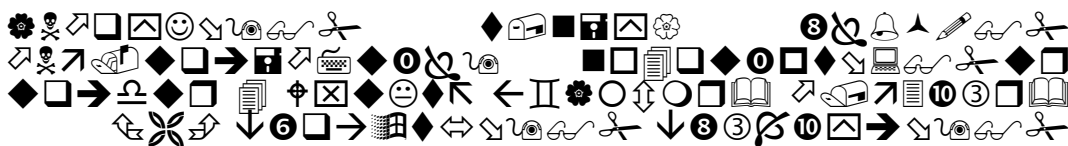
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>18</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>19</sup>

### ***E. Kinerja Aparatur Desa dalam Mengelola ADD Perspektif Ekonomi Islam***

Kinerja menurut perspektif islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengkualifikasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk: 2



Terjemahan :

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.<sup>21</sup>

Maksud dari ayat ini adalah para pekerja harus selalu meningkatkan daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan daya yang antisipasi yang kuat. Daya pikir seseorang dapat ditingkatkan dengan cara : rajin membaca dan mencatat

---

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4), Jakarta: Pemerintah Pusat, (2014),41.

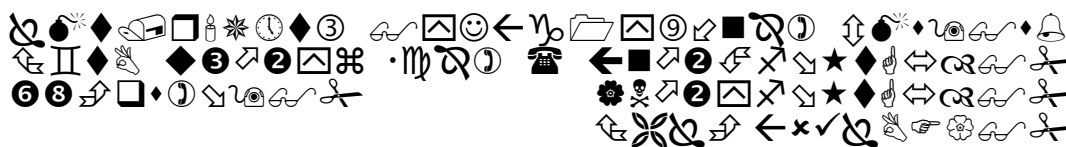
<sup>20</sup>Kementerian Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.562

<sup>21</sup>Ibid

ilmu, rajin mendengarkan, selalu berusaha, banyak berpikir, meneliti, memecahkan masalah dan lingkungan, rajin mengikuti pelatihan, semangat keingintahuan.<sup>22</sup>

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.<sup>23</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Qashâsh Ayat 26



Terjemahan :

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashâsh/26)

Tafsir ayat :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (“Ya Bapakku! Ambilah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggebalakan kambing untuk kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya) maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, kerana dia orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu nabi syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakuka Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya.

Aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan publik harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar adanya kepuasan masyarakat dari kinerja aparatur desa. Menjadi seorang aparatur desa memang tidak mudah karena harus

<sup>22</sup>Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 265

<sup>23</sup>Ibid

memiliki sikap yang sopan santun serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi serta harus adil dalam mengambil keputusan.

Konsep kualitas pelayanan merupakan cara untuk mengukur aktivitas pelayanan suatu organisasi melalui kinerja petugasnya terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Di dalam hal ini yang perlu dipahami adalah bahwa pelayanan berupa suatu aktivitas yang dijalankan untuk memberi manfaat bagi konsumen sebagaimana yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perseorangan.

Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya. Islam tidak mengakui dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik. Islam juga mengajarkan kepada umat manusia atau pekerja agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memberikan pelayanan terbaik kepada umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia dan melupakan pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Sebagian kecil dari Al-Qur'an dan Hadist yang mendorong umat manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama.<sup>24</sup>

#### ***F. Perspektif Ekonomi Islam***

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti Agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (Way of life), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen,

---

<sup>24</sup> Ermawati, Riza putrid utami, Irham pakkawaru, Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada nasi kuning puput di kayumalue, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam-JIEBI*, V 2, No.1 (2022)

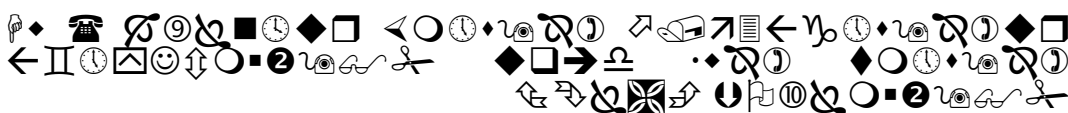
sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang dikalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.<sup>25</sup>

Dalam perpektif Islam, akidah dan tauhid adalah fondasi utama dalam eksistensi manusia dimuka bumi ini. Konsep abdillah(hamba Allah), yang telah diutarakan dalam Alquran, memberikan kesan bahwa seluruh desahan nafas manusia harus diatur untuk mengabdikan diri kepada Allah swt.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan diri untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang di turunkan Allah (Alqur'an dan As-sunah).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163 :



Terjemahnya :

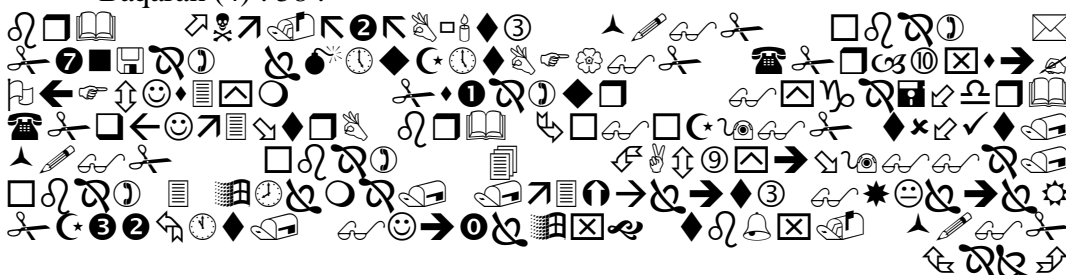
dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

<sup>25</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan bank Indonesia, PT RAJAGRAFINDO PERSADA

<sup>26</sup> Abdul muzzakir, Mengkonstruksi konsep spiritual capital berbasis islam values di dalam organisasi bisnis islam: A literature study, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam- JIEBI*, V 3, No.2 (2021) 112

2. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Al-qur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Kata keadilan dalam al-qur'an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-

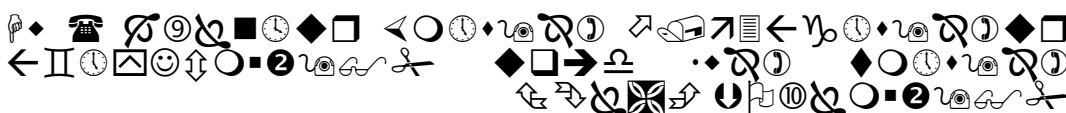
Baqarah (4) : 58 :



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

3. Masalah Masalah adalah sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam. Hakikat masalah segala bentuk kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 163 :

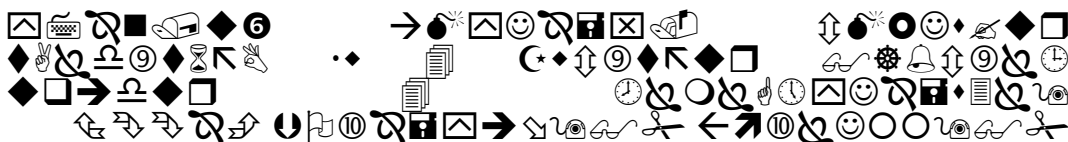


Terjemahnya :

dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.



- 4. Adl Makna adl atau adil akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan alqur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'am (6) : 115 :

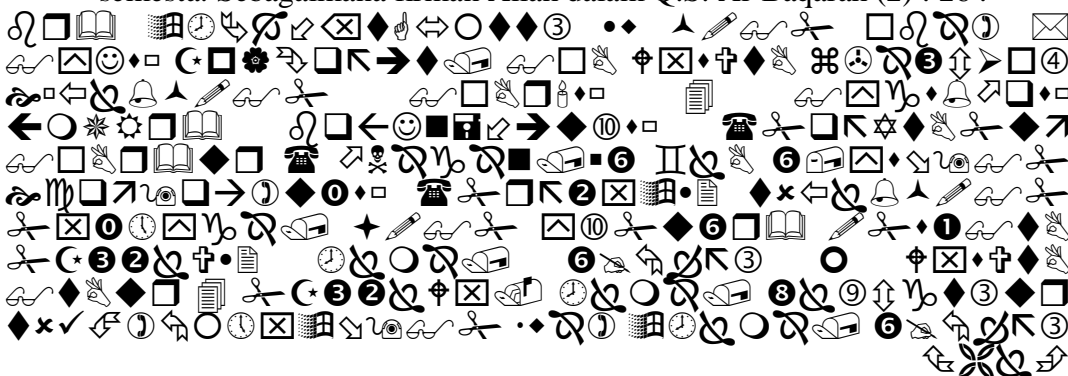


Terjemahnya :

telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui.

- 5. Khilafah Pengertian umum dari khilafah adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sukap dan perilaku manusia terhadap Allah sesama dan alam

semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 26 :



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini

untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

### ***G. Kerangka Pikir***



**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Desain Penelitian***

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menurut Abdurrahman Fathoni “penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah”<sup>2</sup>. Dalam penelitian ini penelitian akan lebih fokus terhadap Analisis Kinerja aparatur Desa Dalam pengelolaan alokasi dana desa perspektif ekonomi islam (studi di desa rogo kec. Dolo delatan kab. Sigi)<sup>2</sup>

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data dan fakta yang ada di lapangan mengenai kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.<sup>3</sup>

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun yang menjadi lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Desa

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

<sup>2</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusun Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta,2006),Hal 96.

<sup>3</sup>Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2011),Hal 34.

Rogo Kec. Dolo Selatan Kab.Sigi. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimanakah Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Rogo Kec. Dolo Selatan Kab. Sigi) Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. Penulis telah melakukan observasi tentang keadaan ini, sehingga dirasa tepat untuk melakukan penelitian.
2. Belum ada penelitian sebelumnya tentang masalah ini di Desa Rogo

### ***C. Data dan Sumber data***

#### **1. Jenis Data**

Data dan sumber data merupakan faktor utama penentu keberhasilan suatu penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan “ilmiah”, bila tidak ada data dan sumber data yang dipercaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dalam dua kategori yaitu :

#### **2. Sumber Data Primer**

Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari wawancara dan konsultasi terdapat pihak-pihak yang bersangkutan Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para aparatur desa dan perwakilan masyarakat yang ada di desa rogo.

### ***D. Sumber Data Sekunder***

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>4</sup>

#### **1. Sumber Data**

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),103.

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>5</sup>

Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto atau video.

Sumber data yang diambil adalah berasal dari para informan sebagai *key person* dan informan lainnya dalam penelitian ini, yaitu orang yang memberikan data setelah wawancara oleh penulis yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap berkompeten hal yang akan diteliti.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bagaimana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Rogo kec. Dolo selatan kab. Sigi. Hal ini bertujuan memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpulkan data.

##### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka mengenai Analisis Kinerja aparatur Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) perspektif

---

<sup>5</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010)

ekonomi islam (Studi di Desa Rogo kec. Dolo selatan Kab. Sigi) Wawancara langsung digunakan untuk mewawancarai informan dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>6</sup>

### **3. Metode Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan untuk data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dalam permasalahan pada penelitian ini.<sup>7</sup>

### ***F. Tehnik Analisis Data***

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Dalam melakukan analisis yang telah penulis dapatkan dari hasil penelitian baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:<sup>8</sup>

#### **1. Redukasi Data**

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu atau

---

<sup>6</sup>Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2008, 204.

<sup>7</sup>Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>8</sup> Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung, Pustaka Setia, 2012)

diteliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama penulis melakukan penelitian lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Rangkaian ini tentunya dimaksudkan untuk menghadirkan data-data yang rapi dan dipahami.<sup>9</sup>

## **2. Penyajian Data**

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila diverifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>10</sup>

## ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dimaksudkan disini adalah untuk menjamin validitas dan tingkat kredibilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2011).

<sup>10</sup>Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

<sup>11</sup>Sasmoko. *Metode Penelitian* (Jakarta, UKI Press, 2004).



Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan dapat dilakukan dengan cara :

**1. Perpanjangan pengamatan melakukan pengamatan.**

Wawancara lagi dengan narasumber data yang pernah Perpanjang pengamatan adalah pengamatan kembali ketempat lapangan, untuk ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang benar atau tidak.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

**2. Meningkatkan ketekunan**

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan melakukan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau tidak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sasmoko. *Metode Penelitian* (Jakarta, UKI Press, 2004).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum kondisi Desa Rogo**

##### **1. Sejarah Desa Rogo**

Wilayah Desa Rogo dalam konteks sosial-kultural merupakan daerah yang didiami oleh etnik Kaili yang dalam kesehariannya menggunakan dialeg Ado dan Ledo.

Dalam perkembangannya daerah Rogo telah dihuni oleh penduduk dan pada saat itu telah terbangun dengan baik pranata sosial sehingga dari hal tersebut susunan dan mekanisme kelembagaannya telah tertata dengan baik. Sejak masuknya bangsa penjajah dan pada hingga tahun 1950-an Desa telah menyanggah status sebagai Kampung dan pada tahun 1970-an Kampung Rogo berubah lagi menjadi Desa yang saat itu secara Administrasi Pemerintahan masuk dalam wilayah Kecamatan Dolo Kabupaten Tingkat II Donggala.

Dalam perkembangannya Desa Rogo juga tidak terlepas dari perkembangan sosial yang ada, sehingga mulai tahun 1950-an Rogo tidak dapat membendung besarnya arus migran dari beberapa daerah. Sehingga saat ini Desa Rogo menjadi satu wilayah yang awalnya Homogen menjadi wilayah Heterogen. Walaupun demikian kondisi sosialnya, interaksi antar etnik tetap berjalan baik. Hal ini ditandai dengan terjadinya proses asimilasi dan transformasi antar budaya.

Bahasa pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Kaili Ado, Ledo dan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wawan candra (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis, Rogo 25 maret 2023 bersumber dari RPJMDes 2018

**Tabel 4.1**  
**Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Rogo**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>
1.	KANA LELE	Tidak Diketahui
2.	LAKO MAJADI	Tidak Diketahui
3.	BAWANTINA	Tidak Diketahui
4.	TOPARANO	Tidak Diketahui
5.	NGGIYA	Tidak Diketahui
6.	SUSAWA	Tahun 1941 Sampai 1956
7.	DENGE SURONGGU	Tahun 1957 Sampai 1958
8.	SESA BASU	Tahun 1959 Sampai 1966
9.	MUNDU	Pejabat Sementara
10.	HALEKO	Tahun 1966 Sampai 1970
11.	NAJO SUNU	Tahun 1971 Sampai 1970
12.	BAHLUDIN PALIRANTE	Tahun 1973 Sampai 1985
13.	YALINUSI SURONGGU	Tahun 1986 Sampai 1995
14.	AMBAS HAMZA	Tahun 1996 Sampai 2007
15.	IMRAN LEMBAH	Tahun 2008 Sampai 2013
16.	HAMZA LABASO	Tahun 2013 Sampai 2014
17.	AJMAIN RAMDHAN, S.A.P	Tahun 2015 Sampai 2016
18.	FUAD HUDIN	2017- Sekarang

Sumber : RPJMDesa

**Tabel 4.2**  
**Pembangunan Desa Rogo**

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa Baik</b>	<b>Sumber Dana</b>
1980	Pembangunan SDN Inpres Rogo	APBD KAB
1980	Pembangunan Mesjid Al-	Swadaya
1980	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Swadaya
1980	Pembangunan SDN Inpres I Rogo	APBD KAB
1982	Pembangunan Jalan Pue Guntu	Swadaya
1983	Pembangunan Sekolah SD Rogo	APBD KAB
1985	Pembangunan Mesjid Al-ITTIHADU	Swadaya
1985	Pembangunan Jalan Mapane Limba	Swadaya
1986	Pembangunan Mesjid ASYAADA	Swadaya
1986	Pembangunan Jalan Selebes	Swadaya
1987	Pembangunan Gereja BK Korps Rogo	Yayasan
1998	Pembangunan Jalan Puskesmas	APBD KAB

2000	Pembangunan Jalan Ramba	APBD KAB
2005	Pengaspalan Jalan Dusun III	APBD KAB
2005	Pengaspalan Jalan Dusun II	APBD KAB
2005	Pembangunan Kantor Desa	ADD
2005	Pembangunan Polindes	APBD KAB
2006	Pembangunan Jalan Mapane Limba	Swadaya
2007	Pembangunan Saluran Air Persawahan	APBD
2007	Pembangunan Puskesmas	APBD KAB
2007	Pembangunan Sekolah Al- Khairat	PNPM
2008	Pembangunan Gedung PKK	DPD/K
2008	Reklamasi Jalan Pertanian	APBN
2008	Pembangunan Kantor Desa	ADD
2010	Pembangunan SMA 10 Sigi	APBD KAB
2012	Pembangunan Sekolah TK	PNPM
2013	Pembangunan Sarana Air Bersih	APBN
2013	Pembangunan Sekolah PAUD	PNPM
2015	Pembangunan Irigasi Persawahan	APBN
2016	Pembangunan Bronjong Air Bersih	APBN

Sumber : RPJMDesa

## 2. Kondisi Geografis Desa Rogo

### Geografis

#### a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Rogo merupakan salah satu dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Dolo Selatan, yang terletak 1 (Satu) Km arah utara dari ibu kota Kecamatan Dolo Selatan.

Desa Rogo mempunyai luas wilayah 10.125 m<sup>2</sup>

Adapun batas wilayah Desa Rogo adalah sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Pulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Ramba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Baluase
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantolo Bete

#### **b. Iklim**

Iklim Desa Rogo sebagaimana desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan dengan curah hujan 2000/3000 mm, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.<sup>2</sup>

### **3. Kondisi Demografis Desa Rogo**

#### **a. Jumlah Penduduk**

Desa Rogo mempunyai jumlah penduduk 1.782 Jiwa, yang tersebar dalam 04 (Empat) dusun 05 (Lima) RT, dengan Perincian tabel sebagai berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Rogo**

<b>Dusun I</b>	<b>Dusun II</b>	<b>Dusun III</b>	<b>Dusun IV</b>	<b>Jumlah</b>
197 jiwa	360 jiwa	664 jiwa	561 Jiwa	1.782Jiwa

Sumber :RPJMDesa 2018-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Rogo secara keseluruhan adalah 1.782 jiwa.

Di Desa Rogo, yang memiliki jumlah penduduk 1782 Jiwa terdiri dari laki-laki 890 jiwa dan perempuan 892 jiwa dengan jumlah 552 KK. Di Desa Rogo

---

<sup>2</sup> Wawan candra (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis, Rogo 25 maret 2023 bersumber dari RPJMDes 2018

terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I memiliki jumlah 197 jiwa serta 68 KK, Dusun II memiliki jumlah 360 jiwa serta 116 KK, Dusun III memiliki jumlah 664 jiwa serta 201 KK dan Dusun IV memiliki jumlah 561 jiwa serta 167 KK. RT 1 67 KK dan RT 2 100 KK.

#### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Rogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rogo**

No	Uraian	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	175
2	Sekolah Dasar/Sederajat	363
3	SMP/ Sederajat	236
4	SMA/ Sederajat	210
5	Akademi	149
6	Serjana S1	18
7	Serjana S2	2
8	Serjana S3	-
9	Pondok Pasantren	1
10	Pendidikan Keagamaan	11
11	Sekolah Luar Biasa	1
12	Kursus Keterampilan	20
13	Bidan	1
14	Perawat	2
15	Dukun Bayi	3
16	Tidak Lulus	30
17	Tidak Sekolah	27

Sumber : RPJMDesa 2018-2021

Masyarakat Desa rogo menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas dan hal ini dapat dilihat dari tabel di atas adanya peningkatan angka pendidikan pada jenjang pendidikan 9 tahun dan 12 tahun. Bagi masyarakat Rogo, pendidikan sudah menjadi tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, namun

terkadang hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena terbentur dengan tingginya biaya pendidikan yang ada. Hal ini dapat di lihat dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan formal sebagai berikut.

**Tabel 4.5**  
**Lembaga Pendidikan Formal**

No.	Nama Lembaga Pendidikan Formal	Jumlah	Keterangan
1.	Taman kanank-kanak	1	
2.	Sekolah Dasar	2	
3.	Sekolah Menegah Pertama	-	
4.	Sekolah Menengah Atas	1	

Sumber : RPJMDesa 2018-2021

### **c. Mata Pencaharian**

Sektor kegiatan unggulan Desa Rogo yang paling dominan adalah sector pertanian. Kegiatan sector pertanian ini merupakan fungsi dan peran utama wilayah Desa Rogo untk memenuhi kebutuhan internal Desa, sebagai kondisi pasar regional. Sedangkan kegiatan sector lainnya juga digolongkan sebagai sector unggulan yang tidak terlalu dominan, namun sector tersebut sangat penting untuk dikembangkan menjadi sector pendukung terhadap kegiatan unggulan. Kegiatan sector yang perlu dikembangkan antara lain bidang peternakan, perdagangan dan industry kecil. Adapun Mata Pencarian Desa Rogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Rogo**

No	Uraian	Jumlah
1	Karyawan	-
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	23
3	TNI/POLRI	1
4	Swasta	20
5	Wiraswasta/Pedagang	7
6	Petani	100
7	Buruh Tani	1.300
8	Nelayan	-
9	Peternak	10
10	Jasa	-
11	Pengrajin	10
12	Pekerja Seni	-
13	Pensiunan	5
14	Tidak Bekerja/Pengangguran	209
15	Lainya	57

Sumber : RPJMDesa 2018-2021

### 1) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Rogo sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian (Kebun), sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas -fasilitas lainnya

### 2) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Rogo adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Kepemilikan Ternak masyarakat Desa Rogo**

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Babi	Lainya
1.488 Ekor	395 Ekor	135 Ekor	40 Ekor	15 Ekor

Sumber : RPJMDesa 2018-2021



#### d. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Rogo secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Sarana Dan Prasarana Desa Rogo**

No	Uraian	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Gedung TK	1 Unit
3	Gedung MDA	1 Unit
4	Gedung SD	2 Unit
5	Gedung SLTP	0 Unit
6	Gedung SLTA	1 Unit
7	Mesjid	3 Unit
8	Musholla	0 Unit
9	Gereja	1 Unit
10	Pasar Desa	1 Unit
11	Puskesmas Pembantu	1 Unit
12	Poskesdes	1 Unit
13	Gedung PKK	0 Unit
14	Jembatan	3 Unit
15	Jalan Dusun	1 Km
16	Jalan Desa	3 Km
17	Jalan Kabupaten	30 Km
18	Jalan Provinsi	34 Km

Sumber : RPJMDesa 2018-2021

#### 4. Kondisi Pemerintahan dan kelembagaan masyarakat

##### a. Struktur Pemerintah Desa Rogo

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga/organisasi Desa dan mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan Desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Adapun struktur pemerintah Desa rogo yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintah, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Pelayanan, Kadus I, Kadus II, Kadus III Dan Kadus IV.

Desa Rogo selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tentang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya pemerintah Desa Rogo dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama perangkat Desa dan Perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan. Peran Lembaga kemasyarakatan Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah Desa. Disamping itu fungsi dari Lembaga kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Struktur organisai Pemerintah Desa Rogo adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

b. Kelembagaan masyarakat

Adapun kelembagaan masyarakat yang ada di desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi adalah kelompok masyarakat, BUMDesa, Linmas, PemDes, RT, RW, kepemudaan, TP-PKK, BPD, LPMDesa, dan RISMA.

---

<sup>3</sup> Sumber RPJMDesa 2018-2021

## **B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo**

Penelitian yang dilakukan adalah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui kinerja Aparatur Desa Rogo Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Rogo ini dikelola langsung oleh aparatur desa, Kepala desa sebagai penanggung jawab program.

Proses penentuan program ADD di Desa Rogo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur Desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa tersebut. Dan pada tahun 2022 ini program telah di musyawarahkan serta dana sudah masuk di rekening Desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPP).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30%, Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional Tim penyelenggara Alokasi Dana Desa.<sup>4</sup>

Ada beberapa tahapan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar mencapai kesejahteraan masyarakat:

### **1. Tahap perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam

---

<sup>4</sup> Dokumen Desa Rogo, Maret 2023

pembangunan fisik Desa Rogo dapat dilihat dari prosedur perencanaannya, yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan MCK, drainase, rabat beton, pembangunan beda rumah, perbaikan posyandu, pembuatan talut dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan dengan baik.<sup>5</sup> Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemerintah Desa Rogo melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Rogo tersebut seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, kepala dusun, RT dan masyarakat yang menyumbang ide/pemikirannya dan tenaga sehingga proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rogo tentang rancangan yang di susun melalui RPJMDesa, menurut bapak Fuad hudin selaku kepala Desa:

“jadi pada saat (MUSREMBANG-DESA) banyak masyarakat yang menyampaikan usulan yang di sampaikan dan diwakilkan oleh kepala Dusun, dan usulan tersebut di tampung oleh BPD, namun dari usulan tersebut

---

<sup>5</sup> Ramansyah (kaur keuangan Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

ada yang diterima ada juga yang tidak, karena masih terbatasnya dana yang di salurkan ke desa. Dari usulan tersebut hanya yang paling dibutuhkan yang akan dipilih oleh anggota BPD”<sup>6</sup>

Sedangkan menurut ibu mahdalena selaku masyarakat desa rogo yang berhasil penulis wawancara mengatakan bahwa :

”Pada saat (MUSREMBANG-DESA) masyarakat mengusulkan tentang infrastruktur yang harus dibangun di desa. Dan saya menganggap bahwa ada beberapa usulan yang diterima yang sangat di butuhkan masyarakat ada juga yang belum dipilih karena dana yang belum mencukupi”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah desa rogo dalam tahap perencanaan telah melibatkan masyarakat dengan mendengar usulan dari masyarakat serta mengutamakan kebutuhan di desa rogo tersebut.

## 2. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo dalam pembangunan fisik sudah melaksanakannya dengan baik, hal tersebut dilihat dari berbagai upaya masyarakat yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan ADD. Salah satu upaya pemerintah Desa rogo dalam pembangunan fisik yaitu pembangunan MCK, drainase, rabat beton, pembangunan beda

---

<sup>6</sup> Fuad hudin (Kepala desa rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>7</sup> Mahdalena (Masyarakat) wawancara dengan penulis , Rogo 27 maret 2023

rumah, perbaikan posyandu, pembuatan talut dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan bapak wawancandra selaku sekretaris desa rogo mengatakan bahwa:

“memang kami akui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan program kegiatan hingga pembangunan infrastruktur”<sup>9</sup>

Sedangkan menurut ibu netty ariani yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa:

“jika dilihat insfrastruktur yang telah jadi maka bisa kami katakan bahwa pembangunan di desa rogo ini sudah berjalan baik pemerintah desa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seperti pembuatan dreanase dan lain-lain.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

### 3. Tahap penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo dalam pembangun fisik sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang dikelolah oleh pemerintah desa. kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada masyarakat, untuk masyarakat tau biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Rogo yang sesuai dengan rincian dan di arsipkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya penatausahaan adalah sebagai bukti dan mempermudah

---

<sup>8</sup> Wawan candra (Sekretaris Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>9</sup> Wawan candra (sekretaris desa rogo), wawancara dengan penulis , Rogo 26 maret 2023

<sup>10</sup> Netty ariani (masyarakat), wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya pemyelewenangan dari dana desa untuk pembangunan fisik Desa Rogo demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian untuk hal tersebut.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan bapak wawancandra selaku sekretaris desa rogo mengatakan bahwa:

“ Alhamdulillah, pembuatan drainase 130 meter, pembuatan drainase 100 meter, pembuatan rabat beton, pembangunan tribun lapangan, pembuatan drainase 83 meter dan rehap rumah masyarakat miskin 10 unit. Semua sudah terlaksana dengan baik dsn ksmi memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa kami sendiri dan memberikan gaji yang sesuai dengan kesepakatan bersama.”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Mahdalena selaku masyarakat Desa rogo mengatakan bahwa :

“jika saya melihat memang betul sudah adda beberapa yang di bangun oleh pemerintah desa penggunaan dana desa tersebut seperti rehap rumah warga yang kurang mampu ada 10 rumah yang menurut aparatur desa berhak mendapatkannya”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka aparatur desa dalam tahap penatausahaan sudah sesuai.

Penggunaan alokasi dana desa yang di terima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiyaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> Wawan candra (sekretaris desa rogo) wawancara dengan penulis, Rogo, 27 maret 2023

<sup>13</sup> Mahdalena (masyarakat) wawancara dengan penulis, Rogo, 27 maret 2023

<sup>14</sup> RPJMDes Rogo 2017

#### 4. Tahap pelaporan

Hasil wawancara dengan bapak ramasyah selaku kaur keuangan desa rogo mengatakan bahwa:

“Berdasarkan hasil penelitian Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Rogo adalah sudah di laporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Rogo. Jika dilihat dari penelitian pertanggung jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang kemudian dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa Rogo kepada masyarakat dengan baik.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaporan di desa rogo sudah cukup baik.

Sedangkan menurut netty ariani selaku nasyarakat mengatakab bahwa :

”terkait pelaporan biasa telah di wakilkkan oleh kepala dusunnya jika tidak ada bermasalah di desa terkait administrasi berarti pelaporannya sudah cukup baik”<sup>16</sup>

#### 5. Tahap pemeliharaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogo pada dasarnya adalah untuk mengentas kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memanfaatkannya dengan baik.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan ibu mahdalena selaku masyarakat desa rogo mengatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Ramansyah (kaur keuangan) wawancara dengan penulis, Rogo, 27 maret 2023

<sup>16</sup> Netty ariani (masyarakat) wawancara dengan penulis, Rogo, 27 maret 2023

<sup>17</sup> ibid



“ Menurut saya sebagai masyarakat bahwa masyarakat harus bisa memanfaatkan sesuatu yang telah dibangun di desa dan saya melihat masyarakat desa rogo telah melakukan hal tersebut.”<sup>18</sup>

### **C. Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo**

Kinerja aparatur desa rogo sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengelolaan alokasi dana Desa (ADD), maka dari itu aparatur desa harus mampu mengelolah alokasi dana desa (ADD) dengan baik dan benar yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. sebab kinerja aparatur desa yang baik akan memberikan kualitas yang baik pula untuk masyarakat. Maka kualitas kinerja aparatur Desa rogo akan dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa Rogo.

#### **a. Produktivitas**

Produktivitas merupakan efisien dan efektivitas pelayanan pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti yang disampaikan oleh Ramansyah selaku kaur keuangan Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa :

“Jika dipresentasikan menurut saya sekitar 50 persen mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat jika di tingkatkan kesejahteraan pemerintah desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan

---

<sup>18</sup> Mahdalena (masyarakat) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

tugas. Namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi sudah berkeluarga karena harus memenuhi kebutuhan keluarga kalau hanya mengharapkan insentif dari dana desa ini yang 3 bulan sekali baru ada maka itulah yang menyebabkan terkadang pemerintah desa jarang hadir di kantor desa karena harus mencari kerja sampingan makanya jika dilihat dari luar kurang efektif “.<sup>19</sup>

Selain itu, menurut Netty ariani selaku masyarakat Desa rogo mengatakan bahwa

“Menurut saya produktivitas pegawai pemerintah Desa Rogo masih rendah hal ini dikarenakan pemerintah Desa Rogo dalam pengelolaan alokasi Dana Desa tidak ada dibuatkan baliho sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pengelolaan alokasi dana Desa tersebut”.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari beberapa informan di atas mengakui bahwa produktivitas di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ini masih sangat lemah. Masih ada program yang berjalan tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah Desa rogo dalam hal ini sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Desa rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Desa rogo. Karena produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

#### b. Kualitas layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan

---

<sup>19</sup> Ramansyah (Bendahara Desa) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>20</sup> Netty ariani (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

publik. Hal ini seperti yang terjadi di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas layanan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ini dapat dijadikan satu indikator dalam mengukur kinerja pegawai pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan pegawai di pemerintah Desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Seperti yang disampaikan oleh netty selaku masyarakat Desa rogo mengatakan bahwa :

“Kalau ditanya terkait pelayanan sudah cukup baik akan tetapi ada yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah Desa rogo karena dalam memberikan bantuan pemerintah Desa ada yang belum tepat sasaran ada yang berhak mendapatkan namun tidak dapat “<sup>21</sup>

Maka dari itu, kualitas layanan harus di tingkatkan agar supaya kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ini menjadi lebih baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi itu

---

<sup>21</sup> Netty ariani (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

sendiri. Sementara menurut Bapak Arlin selaku ketua BPD Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya jika kita melihat kualitas layanan pemerintah desa rogo ini masih ada yang perlu di perbaiki baik dari kualitas sebagai pemerintah Desa maupun kualitas layanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas layanan belum efektif yaitu karena masih menggunakan sistem keluarga dan satu tahun priode pelayanan dilakukan di rumah kepala desa sehingga BPD mengharapkan agar semua pelayanan di lakukan di kantor Desa”<sup>22</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan informan diatas telah menggambarkan kinerja di pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi kurang baik dan perlu di tingkatkan kualitas pelayanannya.

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi masih ada yang harus diperbaiki dan di tingkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat Desa rogo sehingga dapat terwujud kualitas layanan yang sesuai harapan kita bersama.

### c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pegawai pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

---

<sup>22</sup> Arlin (ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

Responsivitas juga mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD, maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap faham dan mengerti dengan tugas pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi.

Oleh karena itu, faktor responsivitas aparatur menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi. Sementara bapak Fuad hudin selaku kepala Desa rogo mengatakan bahwa:

“Kalau saya ditanya terkait responsivitas yang memiliki arti kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan visi dan misi maka pemerintah desa rogo selalu bersinergi dalam mewujudkan visi misi saya mengakui juga bahwa pegawai di kantor Desa rogo ini sudah tau apa fungsi yang harus mereka jalankan serta tugas berupa administrasi dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah Desa rogo sudah tidak mengalami kesulitan”<sup>23</sup>

Faktor responsivitas kinerja aparat Pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam mengelola administrasi serta keuangan di kantor Desa rogo. Ini sangat berpengaruh terhadap responsivitas yang dimiliki pegawai di pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi.

Oleh karena itu, responsivitas dalam pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sangat penting untuk di tingkatkan demi tercapainya

---

<sup>23</sup> Fuad Hudin (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis , Rogo 26 maret 2023

kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan menurut bapak Wawan candra selaku sekretaris desa rogo mengatakan bahwa :

“Menurut saya terkait responsivitas pegawai pemerintah desa sudah mengetahui fungsi dan tugas mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga terjalin kerja sama yang baik terkait pemerintah desa dan atasan dalam pelaporan pertanggung jawaban ”<sup>24</sup>

Sedangkan menurut ibu Mahdalena selaku masyarakat desa rogo mengatakan bahwa:

“Saya melihat sudah cukup baik karena pemerintah bekerja sudah sesuai tugas dan fungsi mereka sehingga mereka dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan arahan kepala desa dan kebijakan yang ada”<sup>25</sup>

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja dipemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Namun responsivitas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari kemampuan pegawai pemerintah Desa rogo kecamatan dolo selatan dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

---

<sup>24</sup> Wawan candra (Sekretaris Desa Rogo) wawancara dengan penulis, 26 maret 2023

<sup>25</sup> Mahdalena (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, 27 maret 2023

Oleh karena itu, responsivitas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik pula seperti pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa dari pada pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dapat berjalan dengan baik walaupun mungkin di dalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan dan produktivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

#### d. Responsibilitas

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja pegawai di pemerintahan Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja pegawai di pemerintahn desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi, maka peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah Bapak Fuad Hudin selaku kepala Desa rogo mengatakan bahwa:

“Kalau terkait responsibilitas maka saya mengatakan bahwa pemerintah desa rogo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah ini mengabarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fuad Hudin (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

Responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi dalam melaksanakan tugas pengelolaan alokasi dana desa.

Responsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja baik pula tentunya begitupun sebaliknya. Seperti hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Arlin mengatakan bahwa :

“Saya melihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa rogo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan sesuai seperti apa yang telah ada diadministrasi maka dari itu bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik yang dimana pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada admistrasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, responsibilitas ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menjadi lebih baik dan sesuai harapan bersama. Responsibilitas yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

#### e. Akuntabilitas

---

<sup>27</sup> Arlin (Ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023



Akuntabilitas mengandung arti beberapa besar organisasi publik tunduk pada aparat Desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah kepala desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma.

Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga didalamnya termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki.

Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang dimiliki pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya yaitu bapak Fuad hudin selaku kepala Desa rogo mengatakan bahwa :

“Memang kalau saya melihat kinerja pemerintah desa rogo ini sudah akuntabel karena mereka merespon dengan baik keluhan masyarakat dan menanggapi secara cepat dan semuanya dilakukan dengan terbuka dan mereka patuh terhadap atasan”<sup>28</sup>

Oleh karena itu, akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga didalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga ini sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah Desa rogo.

Hasil wawancara bersama bapak Wawan candra selaku sekretaris Desa rogo mengatakan bahwa :

---

<sup>28</sup> Fuad Hudin (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

“Kalau menurut saya kinerja kami sudah cukup baik apalagi terkait akuntabilitas karena pemerintah desa rogo lebih terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat karena itu kami selalu berusaha menanggapi apa saja yang menjadi keinginan serta harapan dari masyarakat tersebut”<sup>29</sup>

Sedangkan hasil wawancara bersama bapak BPD desa rogo mengatakan bahwa:

“Sudah mengikuti prosedur yang berlaku karena tingkatan dari desa itu kecamatan sehingga apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh desa harus berkoordinasi dengan kecamatan dan itu sudah dilakukan oleh kepala desa dan pemerintah desa”<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik yang dimana pemerintah desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi dalam melaksanakan sudah berdasarkan pada akuntabilitas yang baik dan benar yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat dengan terbuka dan mematuhi aturan dari atasannya. Oleh karena itu, Akuntabilitas ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menjadi lebih baik dan sesuai harapan bersama. Akuntabilitas yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.

Cara pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

---

<sup>29</sup> Wawan candra (Sekretaris Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>30</sup> Arlin (Ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

Hal ini juga disampaikan oleh bapak fuad hudin selaku kepala desa rogo yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan alokasi dana desa itu tergantung oleh usulan warga karena sebelum itu saya selalu melaksanakan musyawarah dengan masyarakat dan sesuai dengan undang-undang yaitu mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban sehingga dengan demikian kami dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang di wakikan oleh kepala dusun masing-masing”<sup>31</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arlin selaku ketua BPD desa rogo mengatakan bahwa:

“ Dalam hal pengelolaan alokasi dana desa saya memang selalu diundang dalam pelaksanaan musyawarah yang membahas terkait dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan selalu berkoordinasi dengan kecamatan. Hanya saja, kita hanya manusia biasa dan pastinya apa yang kita lakukan tidak sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akan tetapi kami selaku BPD dan pemerintah Desa akan selalu berusaha melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perundang-undangan”.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja aparatur Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam pengelolaan alokasi dana Desa Rogo sudah berjalan dengan baik yang dimana aparatur Desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi dalam melaksanakan sudah berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

---

<sup>31</sup> Fuad Hudin (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>32</sup> Arlin (Ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

#### **D. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rogo**

Kinerja pemerintah Desa rogo dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) cukup rendah dari segi kualitas layanan dan produktivitas ini diakibatkan oleh kesejahteraan pemerintah desa. Jika ditingkatkan kesejahteraan pemerintah desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan tugasnya, namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi yang sudah berkeluarga karena harus memenuhi kebutuhan kalau hanya mengharapkan insentif dari Dana Desa ini di bayarkan 3 bulan sekali. Maka dari itulah yang menyebabkan terkadang pemerintah Desa jarang hadir di kantor Desa karena harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya jika dilihat dari luar kualitas layanan dan produktifitas kurang efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.

1. Prinsip tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan diri untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang di turunkan Allah (Alqur'an dan As-sunah).

Hasil wawancara bersama bapak Wawan candra selaku sekretaris Desa rogo mengatakan bahwa :

“ Jadi menurut saya kinerja aparatur desa rogo sudah sesuai tauhid karena aparatur desa lebih mengutamakan tauhid atau menghindari yang di larang orang Allah SWT yaitu adanya keterbukaan program

yang dijalankan kepada masyarakat serta tidak adanya kemudharatan didalamnya ”<sup>33</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Rogo sudah sesuai dengan prinsip tauhid karena tidak ada kemudharatan didalamnya.

2. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Al-qur’an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Hasil wawancara bersama bapak Fuad hudin selaku Kepala Desa rogo mengatakan bahwa :

“ Kalau ditanya tentang keadilan kami selaku aparatur Desa Rogo tanpa terkecuali selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat yaitu mencoba selalu berlaku adil walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang beda pendapat namun kami selalu mencoba memberikan yang terbaik yaitu memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dan kami tidak melakukan sewenang-wenang kepada masyarakat ”<sup>34</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur Desa Rogo dalam prinsip keadilan yaitu menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada masyarakat Desa rogo.

3. Masalah adalah sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan

---

<sup>33</sup>Wawan candra (Sekretaris Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

<sup>34</sup> Fuad Hudin (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

suatu pihak dalam aktivitasnya, karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil wawancara bersama bapak Arlin selaku Ketua BPD Desa rogo mengatakan bahwa :

“ Saya selaku perwakilan masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melihat selama ini kinerja aparatur Desa Rogo dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak ada mengandung sebuah hal yang dapat merugikan masyarakat aparatur Desa Rogo mengikuti peraturan pemerintah daerah ”<sup>35</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur desa rogo mendatangkan sebuah manfaat bukan mudarat atau sesuatu yang merugikan.

4. Adl Makna adl atau adil akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan, dan kejelasan. Prinsip keadilan yaitu, di antara pesan-pesan alqur'an (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Hasil wawancara bersama Ibu Mahdalena selaku masyarakat Desa rogo mengatakan bahwa :

“ Jika menurut pendapat saya berbicara terkait keadilan pasti semua itu menjadi harapan masyarakat Desa Rogo kalau melihat kinerja aparatur desa rogo mereka menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran buktinya mereka telah berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya walaupun kadang ada

---

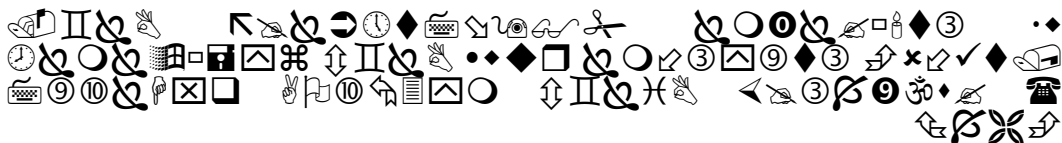
<sup>35</sup> Arlin (Ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

sebagian masyarakat yang berpendapat beda tapi inilah pendapat saya<sup>36</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara maka kinerja aparatur desa rogo telah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.

Dalam hal ini jika dikaji dalam prinsip Ekonomi Islam berarti kinerja aparatur Desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu taat terhadap prinsip maslahat dan mengambil manfaat serta menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan social.

Prinsip ini merupakan sangat penting dalam dunia pemerintahan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Fusilat ayat 42 sebagai berikut.



Terjemahan :

Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana Lagi Maha Terpuji.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Mahdalena (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 27 maret 2023

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an itu dan mendustakannya saat ia datang kepada mereka adalah orang-orang yang celaka lagi disiksa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang mulia dengan pemuliaan dari Allah SWT dan penjagaan-Nya terhadapnya dari segala perubahan dan pergantian, kebatilan tidak menyusupinya dari arah manapun dan tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya, ia terjaga sehingga tidak dikurangi atau ditambah, di turunkan dari Allah SWT yang Maha bijaksana dengan mengatur perkara hamba-hambaNya, Dia Maha terpujikaena Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan.

---

<sup>37</sup> Kementerian Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut

1. Kinerja Aparatur Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) cukup rendah dari segi kualitas pelayanan dan produktivitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian faktor Responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas cukup baik karena aparatur Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa serta terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.
2. Pengelolaan ADD di Desa Rogo) sesuai dengan perspektif ekonomi Islam baik dari aspek kualitas pelayanan, produktivitas, akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas karena melaksanakan tugasnya mendahulukan kemaslahatan daripada kemudharatan dalam melakukan kinerja mereka terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

#### ***B. Saran***

Adapun saran-saran yang penulis ingin berikan yaitu kepada yaitu Kepala Desa, Masyarakat, Aparatur Desa Rogo, Kementerian Desa:

1. Saran penulis kepada Kepala Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yaitu, agar lebih meningkatkan sumber daya manusia aparatur Desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
2. Saran penulis kepada masyarakat yaitu, agar lebih bijak dalam setiap melakukan komplek terhadap kinerja dari aparatur desa rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi harus sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Saran penulis kepada aparaturnya desa yaitu tingkatkan kinerja pada aspek kualitas pelayanan dan produktivitas.
4. Saran penulis kepada Kementerian Desa yaitu lebih di tingkatkan lagi kesejahteraan bagi aparaturnya desa.
5. Saran penulis kepada pembaca terkait judul yaitu Peran badan usaha milik desa (BUMDES) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Rogo kecamatan dolo selatan kabupaten sigi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arianto I dengan judul “ Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca”

Arikunto Suharsimi, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Ariani Netty (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

Arlin (ketua BPD Rogo) wawancara dengan penulis, Rogo 26 maret 2023

Baswori dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Peneltian untuk Mahasiswa Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung, Pustaka Setia, 2012)

Cahyono heru dkk, *Pengelolaan dana desa studi dari sisi demokrasi dan kapasitas pemerinta desa*, LIPI Press, anggota Ikapi gedung PDDI Lipi, Jakarta , 2020.

Candra Wawan (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis, Rogo 25 maret 2023 bersumber dari RPJMDes 2018

Dimas dicky adi pamungkas,yusuf Hubungan peran pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD didesa klodran colomadu karanganyar, *jurnal global citizen* ,2 Nomor 2. Desember (2016) 46.

Dimas dicky dkk, Hubungan peran pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD didesa klodran colomadu karanganyar, *jurnal global citizen* ,2 Nomor 2. Desember (2016) 46.

Dokumen Desa Rogo, Maret 2023

Ermawati, Riza putrid utami, Irham pakkawaru, Pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen pada nasi kuning puput di kayumalue, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam- JIEBI*, V 2, No.1 (2022)

Fathoni Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Tehnik Penyusun Skripsi* (Jakarta:RinekaCipta,2006),Hal 96.

Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,” *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192.[Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

Hudin Fuad (Kepala Desa Rogo) wawancara dengan penulis , Rogo 26 maret 2

Hadi Syaikhul, Sepuluh Desa Dianggap Paling Sukses Manfaatkan Alokasi Dana Desa, [https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzqOBeN-sepuluh-desa-dianggap-paling](https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzqOBeN-sepuluh-desa-dianggap-paling-sukses-memanfaatkan-dana-desa) sukses- manfaatkan-dana-desa, diakses tanggal 26 maret 2023.

J Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010)

Kasmir, *pengantar manajemen keuangan*, (Ed 2; Cet.1 jakarta: kencana prenda Media Group, 2016), 182.

Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep teori dan isu (Yogyakarta:Gava media,2004) 27.

Kementerian Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.562

Lalira dianti dkk, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan dikecamatan gemeh kabupaten kepulauan talaud", *jurnal berkala ilmiah efisien*, 18,no 04, (2017) 64.

Muzzakir Abdul, Mengkonstruksi konsep spiritual capital berbasis islam values di dalam organisasi bisnis islam: A literature study, *Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam- JIEBI*, V 3, No.2 (2021) 112

Moehariono, pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),69.

Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 265

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),103.

Mahdalena (Masyarakat Desa Rogo) wawancara dengan penulis, 27 maret 2023

Noor Juliansah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2011),Hal 34.

Novilaksmi Ayu (Kaur Pelayanan) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 januari 2023

Putri kurnia sari, Ainun ni'mah, Khalis fadlulah hana, Analisis sikronisasi budaya kerja sumber daya manusia pada bank syariah Indonesia setelah merger,*Jurnal ilmu ekonomi dan bisnis islam-JIEBI*,V(4), No.2,(2020)

P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan bank Indonesia, PT RAJAGRAFINDO PERSADA

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2007) 25.
- R serlia Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan”, *jurnal ekomen*, vol 20, N. 2, (2020)
- Ramansyah (Kaur Keuangan) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 I januari 2023
- Risto Rendra wuri, Kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan public,
- Rivai veithzal, *managemen sumber daya manusia* untuk perusahaan, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2011)50.
- Sasmoko. *Metode Penelitian* (Jakarta, UKI Press, 2004).
- Septian yuni, dkk “ Analisis kualitas layanan system informasi akademik universitas abdurrah terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode sevqual” *Jurnal teknologi dan open source*, vol. 3 No.1, (2022) : 131-143
- Serlia raflesia Lamandasa1, dkk, Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add) Di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, *Jurnal Eksklusif*, 1, No 1, (2017).
- Solekhan moch, *Penyelenggaraan pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam membangun mekanisme Akuntabilitas*, ( Malang: Setara Press, 2012, 80)
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2008, 204.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, Q dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfatbeta, 2011).
- Sumar in, *Ekonomi Islam: sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif islam*, (Ed. I; Cet; Yogyakarta: Graha ilmu 2013) 3
- Sumardjo, cholis dkk, *Pembangunan Pendesaan dalam Rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2010), 28.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4), Jakarta: Pemerintah Pusat, (2014), 41.
- Verawati ika (Kaur Umum) wawancara awal dengan penulis, Rogo, 26 januari 2023

Wahdani reski dengan judul “ analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa” .

Wardani Raudhatun dan Fadhlia widha, “ Analisis efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kab. Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah 2*, No.3, (2017).

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Kepala Desa**

1. Bagaimana metode pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
2. Bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi
3. Sejauh ini, apa sajakah sarana dan prasarana yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bagaimanakah kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dalam hal ini kinerja aparatur desa yang diukur dari lima aspek yaitu, aspek produktivitas pelayanan publik, atau masyarakat, aspek responsivitas artinya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai, aspek responsibilitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip administrasi dan aspek akuntabilitas artinya kinerja aparatur desa dalam kebijakan politik yang dipilih oleh rakyat artinya bagaimana pejabat mendengarkan asumsi rakyat.

### **B. Sekretaris desa:**

1. Bagaimana metode pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
2. Bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
3. Sejauh ini, apa sajakah sarana dan prasarana yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bagaimanakah kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana dalam hal ini kinerja aparatur desa yang diukur dari lima aspek yaitu, aspek produktivitas artinya mengukur seberapa besar kinerja aparatur desa dalam efektivitas

pelayanan publik, aspek kualitas layanan artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik, aspek kualitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan public atau masyarakat, aspek responsibilitas artinya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai, aspek responsibilitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip administrasi dan aspek akuntabilitas artinya kinerja aparatur desa dalam kebijakan politik yang dipilih oleh rakyat artinya bagaimana pejabat mendengarkan asumsi rakyat.

### **C. BPD**

1. Bagaimana metode pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
2. Bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
3. Sejauh ini, apa sajakah sarana dan prasarana yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bagaimanakah kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana dalam hal ini kinerja aparatur desa yang diukur dari lima aspek yaitu, aspek produktivitas artinya mengukur seberapa besar kinerja aparatur desa dalam efektivitas pelayanan publik, aspek kualitas layanan artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik, aspek kualitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan public atau masyarakat, aspek responsibilitas artinya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai, aspek responsibilitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip administrasi dan aspek akuntabilitas artinya kinerja aparatur desa dalam kebijakan politik yang dipilih oleh rakyat artinya bagaimana pejabat mendengarkan asumsi rakyat.



#### **D. Masyarakat**

1. Bagaimana metode pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
2. Bagaimana peran aparatur desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rogo Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi.
3. Sejauh ini, apa sajakah sarana dan prasarana yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bagaimanakah kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana dalam hal ini kinerja aparatur desa yang diukur dari lima aspek yaitu, aspek produktivitas artinya mengukur seberapa besar kinerja aparatur desa dalam efektivitas pelayanan publik, aspek kualitas layanan artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik, aspek kualitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelayanan public atau masyarakat, aspek responsibilitas artinya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai, aspek responsibilitas artinya kinerja aparatur desa dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip administrasi dan aspek akuntabilitas artinya kinerja aparatur desa dalam kebijakan politik yang dipilih oleh rakyat artinya bagaimana pejabat mendengarkan asumsi rakyat.

**Lampiran 1**

**Dokumentasi bersama kepala Desa Rogo  
Bapak Fuad Hudin**



**Dokumentasi bersama Sekretaris Desa Rogo  
Bapak Wawancandra**



**Dokumentasi bersama ketua BPD Desa Rogo  
Bapak Arlin**



**Dokumentasi bersama masyarakat Desa Rogo  
Ibu Netty Ariani**



**Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Rogo  
Ibu Mahdalena**

